

IMPLEMENTASI STRATEGI KONTEN DAN KAMPANYE DIGITAL DALAM PENGUATAN BRANDING, PEMBANGUNAN KOMUNITAS, DAN LOYALITAS PELANGGAN PADA UMKM D'BLOOM FLORIST JATINANGOR

Gea Widianing Trias¹, Nasha Kaila Junine², Tri Febrianti³, Nur Khanifah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran

gea22001@mail.unpad.ac.id¹, nasha22004@mail.unpad.ac.id², tri.febrianti@unpad.ac.id³,
nurkhanifah22@gmail.com⁴

Abstract

D'Bloom Florist is a micro, small, and medium enterprise (MSME) in the floral industry located in Jatinangor, Sumedang, West Java, facing digital marketing challenges including content inconsistency, low engagement rate, dependence on paid advertising, and the absence of structured brand trust and customer loyalty programs. This project implemented a digital marketing strategy encompassing two main approaches: Content and Campaign Deliverables, and Branding and Community Building, designed using the Design Thinking method through the Empathize, Define, Ideate, Prototype, and Test stages. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and social media performance analysis over two months on Instagram and TikTok. The implementation results demonstrate that the integration of both strategies successfully transformed D'Bloom Florist's digital marketing performance, reflected in improved content consistency, increased audience reach and engagement, strengthened brand trust through customer reviews, and the establishment of an actively used loyalty program.

Keywords: *Digital Marketing, Brand Awareness, Customer Loyalty, MSME, Design Thinking.*

Abstrak

D'Bloom Florist merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang florist yang berlokasi di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, yang menghadapi permasalahan pemasaran digital meliputi inkonsistensi konten, rendahnya engagement rate, ketergantungan pada paid advertising, serta belum adanya program brand trust dan loyalitas pelanggan yang terstruktur. Proyek ini mengimplementasikan strategi pemasaran digital yang mencakup dua pendekatan utama yaitu Content and Campaign Deliverables serta Branding and Community Building, yang dirancang menggunakan metode Design Thinking melalui tahap Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis performa media sosial selama dua bulan pada platform Instagram dan TikTok. Hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi kedua strategi tersebut berhasil mentransformasi kondisi pemasaran digital D'Bloom Florist, tercermin dari peningkatan konsistensi konten, pertumbuhan jangkauan dan keterlibatan audiens, penguatan kepercayaan merek melalui ulasan pelanggan, serta terbentuknya program loyalitas yang aktif digunakan.

Kata Kunci : Pemasaran Digital, Brand Awareness, Loyalitas Pelanggan, UMKM, Design Thinking.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan pengguna internet di Indonesia secara signifikan. Berdasarkan data (We Are Social, 2025), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta jiwa, dengan pertumbuhan sebesar 17 juta pengguna atau 8,7% antara Januari 2024 dan Januari 2025. Sejalan dengan itu, pengguna media sosial di Indonesia tercatat sebanyak 143 juta orang atau setara 50,2% dari total populasi, dengan platform WhatsApp (91,75%), Instagram (84,6%), dan TikTok (77,4%) mendominasi penggunaan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mengoptimalkan media sosial sebagai sarana pemasaran digital yang efektif dan efisien.

Pemasaran digital merupakan kegiatan pemasaran yang memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk memperluas serta meningkatkan fungsi pemasaran tradisional (Regina et al., 2025). Melalui platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan pemasaran berbasis konten, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas produk, dan berinteraksi lebih baik dengan konsumen. Strategi ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembuatan kampanye, penguatan branding, community building, hingga content marketing (Regina et al., 2025). Branding yang efektif memperkuat loyalitas pelanggan, menciptakan kepercayaan, dan meningkatkan nilai Perusahaan (Larasati et al., 2023) sedangkan program loyalitas pelanggan berfungsi sebagai strategi jangka panjang yang tidak hanya mendorong pembelian berulang, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara konsumen dan merek.

Meskipun potensi pemasaran digital sangat besar, penerapannya masih belum optimal di kalangan UMKM akibat keterbatasan literasi dan strategi pemasaran (Firdausya & Ompusunggu, 2023). Studi terdahulu lebih banyak membahas strategi pemasaran digital secara umum tanpa menyentuh integrasi antara content strategy, branding, dan community building secara simultan pada UMKM di sektor kreatif lokal. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengukur efektivitas program Google Review dan loyalitas pelanggan sebagai instrumen penguatan brand trust pada usaha florist skala mikro masih sangat terbatas.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan dua pendekatan utama yaitu Content and Campaign Deliverables serta Branding and Community Building secara bersamaan pada satu objek UMKM. D'Bloom Florist sebagai usaha florist lokal di Jatinangor menghadapi permasalahan nyata berupa engagement rate Instagram hanya 2,5% dan TikTok 1,8%, keduanya jauh di bawah rata-rata nasional masing-masing 6,73% dan 9,38% (Slice.id, 2024), jumlah Google Review yang masih sangat sedikit, serta belum adanya

program loyalitas pelanggan yang terstruktur. Jatinangor sebagai kawasan pendidikan dengan segmen pasar mahasiswa yang tinggi, serta tingginya produksi florikultura Jawa Barat yang mencapai 188 juta tangkai krisan per tahun, menjadikan konteks ini relevan dan strategis untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran digital yang terintegrasi pada D'Bloom Florist, mencakup penguatan brand awareness, peningkatan engagement audiens, pembangunan brand trust melalui Google Review, serta pembentukan program loyalitas pelanggan berbasis poin menggunakan pendekatan Design Thinking.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan proyek implementasi pemasaran digital yang dilaksanakan selama dua bulan pada D'Bloom Florist, usaha mikro florist yang berlokasi di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan adalah Design Thinking, yang diterapkan secara terpadu melalui dua strategi utama: Content and Campaign Deliverables serta Branding and Community Building.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, observasi langsung terhadap akun Instagram @dbloom_florist dan TikTok @dbloom.florist selama periode Oktober hingga Desember 2025. Kedua, analisis performa media sosial menggunakan Meta Business Suite untuk mengukur reach, views, engagement, dan pola konsistensi konten. Ketiga, wawancara mendalam dengan pemilik usaha untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi internal, keterbatasan sumber daya, dan strategi yang telah diterapkan sebelumnya.

Proses implementasi mengikuti lima tahap Design Thinking. Pada tahap Empathize, dilakukan analisis data Instagram Analytics periode 5 Oktober hingga 5 Desember 2025, observasi konten, dan wawancara pemilik. Pada tahap Define, diidentifikasi lima permasalahan utama meliputi penurunan performa konten sebesar 37,2%, ketergantungan pada iklan berbayar hingga 99,99% dari total views, inkonsistensi posting selama 71 hari, rendahnya engagement rate sebesar 1,09%, serta minimnya social proof berupa Google Review. Pada tahap Ideate, dikembangkan konsep konten berbasis storytelling, edukasi, hiburan, dan komersial yang disesuaikan dengan content pillar. Pada tahap Prototype, disusun content calendar planning, content brief, dan caption untuk seluruh periode kampanye. Pada tahap Test, dilakukan peninjauan konten oleh pihak internal sebelum dipublikasikan.

Strategi Branding and Community Building mencakup empat program. Program pertama adalah penguatan visual identity dan tone of voice yang konsisten di seluruh platform. Program kedua adalah kampanye Google Review dengan insentif voucher Rp5.000 bagi pelanggan yang memberikan ulasan sebagai bentuk social proof. Program ketiga adalah program loyalitas berbasis poin, di mana setiap pembelian minimal Rp100.000 menghasilkan satu poin dan akumulasi lima poin dapat ditukarkan dengan potongan harga Rp25.000. Program keempat adalah kolaborasi dengan dua micro-influencer lokal untuk kampanye Flower of the Month dan Flower for a Better Mind.

Keberhasilan implementasi diukur menggunakan delapan indikator KPI, di antaranya konsistensi konten minimal 85% sesuai jadwal, engagement rate minimal 3%, minimal dua micro-influencer terlibat, serta target 100 ulasan Google Review dan 100 hingga 150 peserta program loyalitas dalam dua bulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan dan menganalisis data primer yang berhasil dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 16 responden dan 5 responden wawancara yang dipilih secara acak. Sesuai dengan metodologi yang telah diuraikan sebelumnya, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis tematik. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menggambarkan karakteristik responden serta menjelaskan pola-pola utama yang berkaitan dengan pengangguran di wilayah perdesaan, khususnya ditinjau dari aspek demografis dan spasial. Temuan-temuan ini selanjutnya dibahas dan dikaitkan dengan teori serta hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena pengangguran di desa. Penyajian hasil disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari data.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, diketahui bahwa karakteristik usia responden didominasi oleh kelompok usia produktif awal, yaitu rentang 19–21 tahun. Kelompok usia 19 tahun merupakan proporsi terbesar dengan 37,5%, disusul usia 20 tahun sebesar 25%, sementara sisanya tersebar pada usia 18 dan 21 tahun. Dominasi kelompok usia muda ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran di wilayah perdesaan tidak hanya dialami oleh kelompok usia lanjut, tetapi juga telah menjadi masalah serius bagi generasi muda yang seharusnya berada pada fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja muda dengan kesempatan kerja yang tersedia di desa, sehingga usia produktif tidak secara otomatis

menjamin terserapnya tenaga kerja. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi perdesaan belum mampu mengakomodasi lonjakan angkatan kerja muda yang terus bertambah setiap tahun.

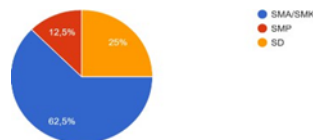
Dari sisi wilayah domisili, responden berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Brebes (20%), Kebumen (20%), Pemalang (13,3%), Blora (13,3%), Grobogan (13,3%), Purbalingga (13,3%), dan Wonogiri (6,7%). Persebaran responden yang relatif merata ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran di desa bukan merupakan fenomena yang bersifat lokal, melainkan mencerminkan masalah lintas wilayah yang bersumber dari kondisi struktural ekonomi perdesaan. Kesamaan karakteristik permasalahan di berbagai kabupaten tersebut mengindikasikan bahwa pengangguran di perdesaan bersifat sistemik, dipengaruhi oleh keterbatasan sektor non- pertanian, rendahnya daya serap lapangan kerja, serta belum berkembangnya sektor produktif alternatif. Secara tematik, temuan ini memperkuat asumsi bahwa pengangguran di desa memiliki dimensi demografis dan spasial yang saling berkaitan.

Dominasi responden usia muda yang tersebar di berbagai wilayah memperlihatkan bahwa tantangan pengangguran di desa tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya daya serap ekonomi desa terhadap angkatan kerja produktif. Kondisi ini sejalan dengan teori ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2020), yang menyatakan bahwa wilayah dengan struktur ekonomi yang sempit dan bergantung pada sektor primer cenderung mengalami surplus tenaga kerja. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Wahab (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Dalam konteks penelitian ini, dominasi usia produktif awal menunjukkan adanya tekanan demografis terhadap pasar kerja desa yang belum siap menyerap tenaga kerja muda secara optimal.

Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian Wahyulianti et al (2025) yang menemukan bahwa kelompok usia muda dan lulusan pendidikan menengah merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pengangguran, terutama di wilayah dengan keterbatasan sektor industri dan jasa. Hal ini menegaskan bahwa persoalan pengangguran di desa tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan proses transisi pendidikan ke dunia kerja yang belum berjalan secara efektif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengangguran di wilayah perdesaan Jawa Tengah merupakan fenomena multidimensional

yang dipengaruhi oleh faktor demografis, spasial, dan struktural ekonomi. Oleh karena itu, penanganan pengangguran perdesaan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, lintas wilayah, serta berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, khususnya bagi generasi muda desa.

Diagram 3.1 Tingkat Pendidikan Mayoritas Penganggur di Desa



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Bagian ini mengawali pembahasan dengan memaparkan karakteristik pendidikan responden yang tergolong sebagai penganggur di wilayah perdesaan. Informasi mengenai tingkat pendidikan penting untuk memahami bagaimana latar belakang sumber daya manusia berpengaruh terhadap peluang kerja dan risiko pengangguran di desa. Pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai modal utama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja. Namun, dalam konteks pedesaan, hubungan antara pendidikan dan penyerapan tenaga kerja tidak selalu berjalan secara linear. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan bahwa tingkat pendidikan penganggur di desa didominasi oleh lulusan SMA/SMK, yaitu sebesar 62,5%. Selanjutnya, lulusan SD sebesar 25%, dan lulusan SMP sebesar 12,5%. Distribusi ini menunjukkan bahwa pengangguran di desa tidak hanya dialami oleh masyarakat berpendidikan rendah, tetapi justru cukup tinggi pada kelompok dengan pendidikan menengah. Dominasi lulusan SMA/SMK menjadi indikasi bahwa peningkatan tingkat pendidikan belum sepenuhnya sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah perdesaan.

Secara teoritis, pendidikan berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja berpendidikan dan permintaan lapangan kerja lokal. Kondisi ini sejalan dengan konsep skill mismatch, yaitu ketika keterampilan dan tingkat pendidikan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia. Desa pada umumnya belum memiliki sektor industri, jasa modern, maupun lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap lulusan SMA/SMK secara optimal. Di sisi lain, lulusan pendidikan menengah cenderung memiliki

ekspektasi terhadap pekerjaan yang lebih stabil dan layak dibandingkan pekerjaan tradisional seperti buruh tani atau pekerja serabutan. Ketika pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun harapan mereka, maka individu tersebut berpotensi memilih untuk menunda bekerja atau menunggu kesempatan kerja lain. Fenomena ini dikenal sebagai pengangguran terdidik.

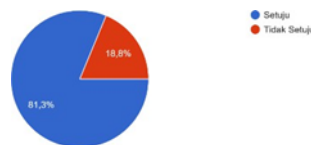
Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyulianti et al (2025) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menengah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sektor ekonomi non-pertanian. Hasil serupa juga ditemukan oleh Wahab (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja akan memperbesar risiko pengangguran, termasuk pada kelompok berpendidikan menengah. Dari sudut pandang teori pembangunan, kondisi ini juga sesuai dengan pemikiran Todaro & Smith (2020) yang menjelaskan bahwa wilayah dengan struktur ekonomi yang sempit dan bergantung pada sektor primer cenderung mengalami surplus tenaga kerja terdidik. Pendidikan yang meningkat tidak otomatis menciptakan pekerjaan jika tidak diikuti dengan diversifikasi sektor ekonomi.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan pengangguran di desa tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga harus diarahkan pada transformasi struktur ekonomi desa. Diversifikasi ekonomi menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan desa pada sektor pertanian tradisional yang bersifat musiman dan memiliki daya serap tenaga kerja terbatas. Pengembangan sektor non-pertanian seperti industri rumah tangga, ekonomi kreatif, pariwisata desa, serta jasa berbasis potensi lokal dapat membuka peluang kerja yang lebih beragam dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi desa merupakan strategi yang relevan dalam memperluas kesempatan kerja. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya lulusan pendidikan menengah. Dukungan berupa akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan jaringan pemasaran menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing usaha desa.

Di sisi lain, penciptaan sektor produktif yang selaras dengan kebutuhan pasar perlu didukung oleh sinergi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha. Pendidikan menengah, khususnya SMA/SMK, perlu diarahkan agar lebih responsif terhadap

kebutuhan dunia kerja lokal melalui penguatan keterampilan praktis, pelatihan berbasis potensi desa, serta program magang atau kemitraan dengan unit usaha setempat. Strategi penanggulangan pengangguran di desa harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa transformasi struktur ekonomi yang lebih adaptif dan produktif, peningkatan pendidikan semata tidak akan cukup untuk menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan basis ekonomi lokal agar desa mampu menjadi ruang yang produktif bagi generasi muda.

Diagram 3.2 Pekerjaan di Desa Bersifat Musiman



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

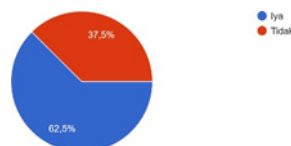
Setelah mengkaji karakteristik demografis responden, bagian ini membahas salah satu faktor struktural utama yang memengaruhi tingginya pengangguran di wilayah perdesaan, yaitu sifat pekerjaan yang musiman. Variabel ini diukur untuk mengetahui sejauh mana responden memandang bahwa keterbatasan kesempatan kerja di desa disebabkan oleh ketergantungan terhadap sektor-sektor yang hanya aktif pada periode tertentu, khususnya pertanian. Hasil survei menunjukkan bahwa 81,3% responden menyatakan setuju bahwa sebagian besar pekerjaan di desa bersifat musiman (misalnya saat musim tanam dan panen), sementara 18,8% responden tidak setuju. Tingginya tingkat persetujuan ini mengindikasikan bahwa pola aktivitas ekonomi desa masih sangat bergantung pada sektor primer, terutama pertanian, yang memiliki siklus produksi tidak berlangsung sepanjang tahun. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap sektor pertanian menyebabkan fluktuasi permintaan tenaga kerja yang tajam. Pada masa tanam dan panen, kebutuhan tenaga kerja meningkat, namun setelah periode tersebut berakhir, aktivitas ekonomi cenderung menurun drastis. Akibatnya, sebagian masyarakat desa mengalami pengangguran periodik, yaitu kondisi menganggur pada waktu-waktu tertentu dalam setahun.

Kondisi ini selaras dengan konsep pengangguran musiman (seasonal unemployment) dalam teori ekonomi tenaga kerja, yang terjadi akibat perubahan musim dan siklus produksi (Borjas & Cassidy, 2021). Dalam konteks perdesaan Indonesia, fenomena ini diperkuat oleh

minimnya sektor alternatif non-pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan. Penelitian Suryahadi et al (2020) menunjukkan bahwa desa-desa yang bergantung pada sektor pertanian cenderung memiliki tingkat kerentanan ekonomi lebih tinggi karena pendapatan rumah tangga sangat fluktuatif mengikuti musim. Temuan serupa juga disampaikan oleh BPS (2023) yang mencatat bahwa sebagian besar penduduk miskin dan setengah menganggur di Indonesia terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan struktur ekonomi berbasis pertanian. Selain itu, Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa ketergantungan pada sektor primer tanpa diversifikasi ekonomi akan memperkuat perangkap pengangguran dan kemiskinan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mendorong migrasi tenaga kerja usia produktif ke kota, sebagaimana dijelaskan dalam teori migrasi desa-kota, di mana individu berpindah karena ketidakpastian pendapatan di desa dan peluang kerja yang lebih stabil di wilayah perkotaan.

Secara tematik, temuan ini memperkuat asumsi bahwa pengangguran di desa bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan masalah struktural yang berakar pada lemahnya basis ekonomi non-pertanian. Ketika desa tidak memiliki sektor ekonomi alternatif seperti UMKM, industri rumah tangga, atau jasa, maka masyarakat akan terus berada dalam siklus kerja tidak tetap. Oleh karena itu, penanganan pengangguran musiman di desa memerlukan strategi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan usaha non-pertanian, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja sepanjang tahun. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi ruang produksi musiman, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diagram 3.3 Mayoritas Penganggur Berpendidikan di Bawah SMA



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Setelah mengidentifikasi faktor struktural seperti keterbatasan lapangan kerja dan sifat pekerjaan yang musiman, bagian ini membahas peran tingkat pendidikan sebagai determinan penting pengangguran di wilayah perdesaan. Pendidikan merupakan indikator utama kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan kemampuan individu untuk memasuki dan bertahan di pasar kerja. Dalam konteks desa, rendahnya tingkat pendidikan sering kali

memperbesar kerentanan terhadap pengangguran karena terbatasnya keterampilan, informasi, dan mobilitas kerja. Dalam teori modal manusia (*human capital theory*), pendidikan dipandang sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas dan peluang kerja seseorang (Becker, 1993; diperkuat oleh Mankiw, 2021). Individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan formal dengan pendapatan lebih stabil. Sebaliknya, pendidikan rendah cenderung berkorelasi dengan pekerjaan informal, upah rendah, dan risiko menganggur yang lebih besar. Suryahadi et al (2020) menemukan bahwa pengangguran di wilayah perdesaan Indonesia lebih banyak dialami oleh kelompok berpendidikan rendah, terutama lulusan SD dan SMP. Hal serupa dilaporkan oleh BPS (2023) yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perdesaan lebih tinggi pada kelompok dengan pendidikan di bawah SMA dibandingkan dengan lulusan pendidikan tinggi. Selain itu, Rahmawati et al (2025) menegaskan bahwa rendahnya pendidikan membatasi akses terhadap pekerjaan non-pertanian yang lebih produktif, sehingga memperbesar risiko pengangguran struktural di desa.

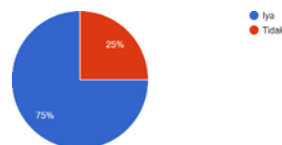
Berdasarkan hasil kuesioner, 62,5% responden menjawab “iya” bahwa mayoritas penganggur di desa berasal dari kelompok berpendidikan di bawah SMA, sedangkan 37,5% responden menjawab “tidak”. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih kuat bahwa pengangguran didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan rendah. Dominasi pandangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat desa menyadari adanya hubungan erat antara rendahnya pendidikan dengan terbatasnya kesempatan kerja. Individu yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai SD atau SMP umumnya tidak memiliki keterampilan teknis maupun administratif yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Selain itu, mereka juga cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi lowongan kerja, teknologi digital, serta pelatihan keterampilan. Namun, proporsi responden yang menjawab “tidak” (37,5%) juga cukup besar dan tidak dapat diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di desa tidak lagi hanya dialami oleh kelompok berpendidikan rendah, tetapi juga semakin banyak dialami oleh lulusan SMA/SMK. Fenomena ini sejalan dengan temuan Sari et al (2022) yang menyebutkan bahwa lulusan menengah di pedesaan menghadapi mismatch antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja lokal.

Dengan kata lain, pengangguran desa bersifat multidimensional. Di satu sisi, pendidikan rendah memang meningkatkan risiko pengangguran. Namun, di sisi lain, meningkatnya pengangguran lulusan SMA/SMK mencerminkan ketidaksiapan struktur ekonomi desa dalam

menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Desa belum memiliki cukup sektor industri, jasa, maupun usaha produktif yang mampu menampung angkatan kerja terdidik. Kondisi ini juga sejalan dengan penelitian Utami & Udjianto (2023) yang menunjukkan bahwa daerah perdesaan dengan struktur ekonomi yang tidak terdiversifikasi cenderung mengalami pengangguran terdidik, karena lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pengangguran desa bukan hanya persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mencerminkan keterbatasan daya serap ekonomi desa. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan pengangguran tidak cukup hanya melalui peningkatan pendidikan formal, tetapi juga harus disertai dengan: Pengembangan sektor ekonomi non- pertanian, Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar lokal, dan

Penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat desa. Dengan begitu, pendidikan dan struktur ekonomi desa harus berkembang secara seimbang agar peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak justru berujung pada peningkatan pengangguran terdidik.

Diagram 3. 4 Rendahnya Pendidikan sebagai Faktor Utama Pengangguran



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Setelah membahas karakteristik pekerjaan desa yang cenderung bersifat musiman serta ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan struktur ekonomi desa, bagian ini secara lebih mendalam mengkaji persepsi masyarakat terhadap rendahnya tingkat pendidikan sebagai faktor utama penyebab pengangguran. Pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia karena sangat menentukan kemampuan individu dalam memasuki dan bertahan di pasar kerja. Dalam konteks perdesaan, keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai serta minimnya pelatihan keterampilan menyebabkan banyak penduduk tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi ini pada akhirnya memperbesar risiko pengangguran, khususnya bagi kelompok usia produktif. Dalam kerangka teori modal manusia (human capital), pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan peluang

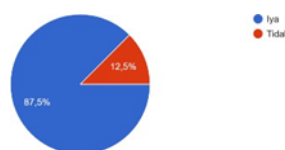
kerja seseorang (Mankiw, 2021). Individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih luas, penghasilan yang lebih stabil, serta risiko pengangguran yang lebih rendah. Sebaliknya, mereka yang memiliki pendidikan rendah sering kali terjebak pada pekerjaan berupah rendah, sektor informal, atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Kondisi ini juga tercermin dalam berbagai temuan empiris. BPS (2023) mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di wilayah perdesaan masih didominasi oleh kelompok berpendidikan SD dan SMP. Selain itu, Wahyuni & Hidayat (2021) menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan secara signifikan meningkatkan kemungkinan individu bekerja di sektor informal atau menganggur di wilayah perdesaan Jawa Tengah. Setyowati & Melati (2020) menyimpulkan bahwa keterbatasan keterampilan akibat pendidikan rendah menjadi penghambat utama dalam mengakses pekerjaan formal di desa. Sementara itu, Zuhaida (2025) juga menegaskan bahwa kualitas pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap peluang kerja, terutama di daerah yang struktur ekonominya masih terbatas.

Berdasarkan hasil survei, 75% responden menjawab “iya” bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor utama penyebab pengangguran di desa, sementara 25% responden menjawab “tidak”. Dominasi jawaban “iya” ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang pendidikan sebagai modal dasar untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Responden menilai bahwa individu dengan pendidikan rendah umumnya memiliki keterampilan terbatas dan hanya dapat bekerja di sektor informal seperti buruh tani, buruh bangunan, atau pekerja serabutan. Sektor-sektor ini tidak memberikan pendapatan yang stabil dan sangat bergantung pada musim serta ketersediaan proyek, sehingga rentan menimbulkan pengangguran secara berkala. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga membatasi kemampuan individu untuk mengakses peluang kerja di luar desa. Sebagian besar pekerjaan formal di kota maupun sektor industri mensyaratkan minimal lulusan SMA/SMK, sehingga masyarakat dengan pendidikan rendah sulit bersaing di pasar kerja yang lebih luas. Meskipun mayoritas responden menganggap pendidikan rendah sebagai faktor utama, proporsi 25% yang tidak setuju menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan bukan satu-satunya penyebab pengangguran desa. Dalam banyak kasus, individu dengan pendidikan menengah bahkan tinggi tetap mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan karena terbatasnya lapangan kerja di desa.

Temuan ini sejalan dengan Nurhaila & Anwar (2024) yang menyatakan bahwa pengangguran di desa juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti minimnya sektor industri,

rendahnya investasi, serta kurangnya diversifikasi ekonomi. Dengan kata lain, pengangguran tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kualitas individu, tetapi juga oleh ketidaksiapan struktur ekonomi desa dalam menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pengangguran di desa merupakan hasil interaksi antara faktor individual (pendidikan dan keterampilan) dan faktor struktural (ketersediaan lapangan kerja). Tanpa transformasi ekonomi desa yang mampu menciptakan pekerjaan produktif, peningkatan pendidikan saja tidak akan cukup untuk menekan angka pengangguran. Temuan ini menegaskan bahwa penanggulangan pengangguran di desa harus dilakukan secara terpadu, melalui: Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, Pengembangan sektor ekonomi desa yang lebih beragam, dan Penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat berkembang menjadi ruang produktif yang mampu menampung dan memberdayakan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan terhadap terbatasnya serapan tenaga kerja. Wijaya et al (2020) juga menemukan bahwa desa dengan sektor usaha yang kurang berkembang cenderung memiliki tingkat migrasi tenaga kerja yang lebih tinggi. Sementara itu, Kementerian Desa PDTT (2022) menegaskan bahwa lemahnya kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pengangguran di desa tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kualitas tenaga kerja, tetapi juga oleh belum berkembangnya struktur ekonomi lokal.

Diagram 3.5 Desa Belum Memiliki Banyak Usaha yang Membuka Lowongan Pekerjaan



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Setelah mengidentifikasi faktor individual seperti pendidikan, bagian ini membahas faktor struktural yang berasal dari kondisi ekonomi desa, khususnya terbatasnya jumlah usaha produktif yang mampu membuka lapangan kerja. Dalam perspektif pembangunan wilayah, keberadaan unit usaha lokal berperan sebagai penggerak utama penciptaan kesempatan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat. Ketika struktur ekonomi desa masih lemah dan didominasi oleh sektor tradisional, maka kemampuan desa untuk menyerap tenaga kerja juga menjadi sangat terbatas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa minimnya usaha lokal

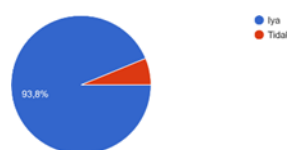
merupakan salah satu penyebab utama tingginya pengangguran di wilayah perdesaan. Nurhaila & Anwar (2024) menyatakan bahwa rendahnya jumlah unit usaha di desa berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil survei, pada pertanyaan kelima sebanyak 87,5% responden menjawab “iya” bahwa desa belum memiliki banyak usaha yang membuka lowongan pekerjaan, sedangkan 12,5% responden menjawab “tidak”. Hasil ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden memandang terbatasnya usaha produktif sebagai penyebab utama pengangguran di desa. Minimnya usaha lokal menunjukkan bahwa desa belum memiliki perkembangan sektor ekonomi yang cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja secara luas. Akibatnya, masyarakat hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan, sehingga persaingan dalam memperoleh pekerjaan menjadi tinggi. Kurangnya usaha di desa juga dapat disebabkan oleh keterbatasan modal, minimnya akses terhadap pasar, serta lemahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat. Banyak desa yang memiliki potensi sumber daya alam, namun belum mampu mengelola potensi tersebut menjadi usaha produktif yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini menyebabkan potensi desa tidak berkembang secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rohmah et al (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan akses permodalan dan rendahnya literasi kewirausahaan menjadi penghambat utama berkembangnya UMKM di desa. Selain itu, keterbatasan usaha juga berkaitan dengan belum maksimalnya peran pemerintah desa dalam mengembangkan ekonomi lokal, misalnya melalui pembentukan UMKM, koperasi desa, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketika BUMDes tidak berjalan efektif atau tidak memiliki program usaha yang jelas, maka desa kehilangan peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru. Septiningsih et al (2024) menegaskan bahwa banyak BUMDes belum berfungsi optimal karena lemahnya manajemen dan kurangnya inovasi usaha.

Dampak langsung dari kondisi ini adalah meningkatnya kecenderungan masyarakat usia produktif untuk merantau ke kota. Migrasi ini biasanya terjadi karena desa tidak mampu menyediakan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Akibatnya, desa dapat mengalami kekurangan tenaga kerja produktif dalam jangka panjang, sehingga pembangunan desa menjadi semakin lambat. Fenomena ini sejalan dengan penelitian BPS (2023) yang menunjukkan bahwa desa dengan basis usaha lemah memiliki tingkat migrasi keluar yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan ekonomi yang lebih beragam. Hasil survei ini menegaskan bahwa persoalan pengangguran desa sangat dipengaruhi oleh lemahnya struktur ekonomi desa dan rendahnya jumlah usaha yang mampu membuka kesempatan kerja. Oleh

karena itu, upaya penguatan ekonomi desa perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha lokal. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dapat diwujudkan melalui kemudahan perizinan, akses permodalan yang lebih luas, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi, teknologi informasi, dan fasilitas produksi. Lingkungan usaha yang mendukung akan mendorong tumbuhnya unit-unit usaha baru sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha yang telah ada.

Selain itu, peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pendidikan kewirausahaan berbasis potensi lokal perlu dikembangkan agar masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatnya kemampuan manajerial, inovasi, dan pemanfaatan teknologi, usaha desa dapat berkembang secara lebih kompetitif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha lokal juga memegang peranan strategis. Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu menyusun program yang mendorong kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan. Sinergi ini dapat memperkuat rantai produksi dan pemasaran, sehingga produk desa memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, UMKM, BUMDes, dan koperasi dapat difungsikan sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu mengelola potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi peran UMKM, BUMDes, dan koperasi, desa dapat membangun basis ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Lembaga- lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan desa, tetapi juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Apabila transformasi ekonomi desa dapat berjalan secara konsisten dan terarah, maka pengangguran di desa dapat ditekan secara bertahap, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan perdesaan secara berkelanjutan.

Diagram 3.6 Putus Sekolah Berkontribusi terhadap Meningkatnya Pengangguran



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Setelah mengidentifikasi berbagai faktor struktural seperti terbatasnya lapangan kerja,

lemahnya sektor usaha desa, serta rendahnya kualitas pendidikan, bagian ini secara khusus menyoroti putus sekolah sebagai faktor individual yang sangat berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran di wilayah perdesaan. Putus sekolah tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan seseorang untuk memasuki, bertahan, dan berkembang di pasar kerja. Ketika proses pendidikan terhenti di usia dini, individu kehilangan kesempatan untuk membangun keterampilan dasar, literasi, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menegaskan bahwa putus sekolah memiliki hubungan yang kuat dengan pengangguran, terutama di wilayah perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi masih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan SD ke bawah, baik di kota maupun desa. Penelitian Sari et al (2022) menunjukkan bahwa individu yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah memiliki risiko menganggur hampir dua kali lipat dibandingkan mereka yang menamatkan SMA/SMK. Temuan ini diperkuat oleh Wahyuni & Maretasari (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya jenjang pendidikan akibat putus sekolah menjadi penghambat utama akses kerja formal di desa. Sementara itu, Sari et al (2022) menegaskan bahwa pendidikan berperan langsung terhadap mobilitas kerja dan daya saing tenaga kerja, terutama di daerah yang struktur ekonominya masih terbatas.

Hasil survei menunjukkan bahwa 93,8% responden menjawab “iya” bahwa putus sekolah berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran di desa, sedangkan hanya 6,3% responden yang menjawab “tidak”. Tingginya tingkat persetujuan ini menunjukkan bahwa masyarakat secara luas menyadari bahwa putus sekolah merupakan salah satu akar permasalahan pengangguran. Persepsi ini sejalan dengan kondisi empiris di lapangan, di mana banyak individu usia produktif yang berhenti sekolah lebih awal akhirnya terjebak dalam pekerjaan tidak tetap atau bahkan menganggur dalam jangka panjang. Putus sekolah menyebabkan individu tidak memiliki bekal pendidikan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Mereka umumnya hanya memiliki keterampilan dasar yang terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin menuntut kemampuan teknis, literasi digital, serta komunikasi. Akibatnya, mereka lebih banyak terserap di sektor informal seperti buruh tani, pekerja bangunan, atau pekerja serabutan yang bersifat tidak tetap dan berpenghasilan rendah. Kondisi

ini meningkatkan kerentanan terhadap pengangguran musiman serta ketidakpastian ekonomi. Selain itu, individu yang putus sekolah juga cenderung kesulitan mengikuti pelatihan kerja formal karena keterbatasan latar belakang pendidikan dan rendahnya kepercayaan diri. Putus sekolah juga berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Banyak anak di desa terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu orang tua bekerja atau karena keterbatasan biaya pendidikan.

Namun, keputusan ini justru menciptakan dampak jangka panjang yang lebih besar. Individu yang putus sekolah memiliki peluang kerja yang lebih sempit sehingga potensi pendapatannya rendah. Pendapatan yang rendah ini kemudian memperbesar risiko kemiskinan, yang pada akhirnya mendorong generasi berikutnya kembali mengalami putus sekolah. Kondisi ini membentuk siklus kemiskinan struktural yang sulit diputus. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati et al (2025) yang menyatakan bahwa putus sekolah di desa menjadi mekanisme utama reproduksi kemiskinan antar generasi. Dengan demikian, putus sekolah tidak hanya menjadi masalah pendidikan, tetapi juga persoalan ekonomi dan sosial yang berdampak langsung terhadap tingkat pengangguran desa. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pengangguran di desa harus diiringi dengan strategi menekan angka putus sekolah melalui: Peningkatan akses pendidikan menengah dan vokasi, Bantuan biaya pendidikan bagi keluarga miskin, Penguatan pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan berbasis desa, serta Pendampingan remaja putus sekolah agar dapat kembali ke jalur pendidikan atau dunia kerja. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, desa tidak hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

Faktor yang Memengaruhi Tingginya Pengangguran di Desa

Bagian terakhir dari analisis data kuesioner dan wawancara ini berfokus pada faktor-faktor utama yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran di wilayah perdesaan. Melalui persepsi responden, bagian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi ketenagakerjaan desa, tidak hanya dari sisi keterbatasan lapangan kerja, tetapi juga dari aspek struktur ekonomi, peran pemerintah, serta kesiapan sumber daya manusia. Pendekatan ini penting karena pengangguran di desa tidak dapat dipahami sebagai masalah tunggal, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Setelah mengkaji berbagai faktor spesifik seperti rendahnya pendidikan, putus

sekolah, serta terbatasnya jumlah usaha produktif di desa, bagian ini menyajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor utama yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran di wilayah perdesaan. Pengangguran di desa tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu penyebab, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor struktural, ekonomi, sosial, dan individual. Dalam perspektif pembangunan wilayah, desa dengan struktur ekonomi sempit, bergantung pada sektor primer, serta minim diversifikasi usaha cenderung memiliki daya serap tenaga kerja yang rendah (Todaro & Smith, 2020). Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan kerja dan dominasi sektor informal masih menjadi masalah utama di desa. BPS (2023) mencatat bahwa sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian dan pekerjaan informal dengan tingkat keamanan kerja yang rendah. Sari et al (2022) menemukan bahwa ketergantungan pada sektor musiman menyebabkan fluktuasi pendapatan dan memperbesar risiko pengangguran terbuka. Sementara itu, Wijaya et al (2020) menegaskan bahwa lemahnya sektor industri dan UMKM di desa membuat tenaga kerja muda sulit memperoleh pekerjaan yang stabil.

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan terakhir, tingginya tingkat pengangguran di wilayah pedesaan dipandang berkaitan erat dengan terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Responden menilai bahwa kesempatan kerja yang tersedia di daerah masih belum mampu menampung jumlah tenaga kerja usia produktif, terutama lulusan baru dari jenjang SMA/SMK. Akibatnya, banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan di daerah asal dan memilih mencari peluang kerja di wilayah lain yang dianggap memiliki kesempatan kerja lebih luas. Selain itu, responden menjelaskan bahwa struktur perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian dan pekerjaan informal yang bersifat tidak tetap. Ketergantungan pada sektor pertanian menyebabkan peluang kerja sangat dipengaruhi oleh musim tanam dan panen. Pada periode tertentu masyarakat dapat memperoleh pekerjaan, namun ketika memasuki masa paceklik atau hasil panen menurun, sebagian tenaga kerja kehilangan sumber pendapatan sehingga meningkatkan risiko pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi desa belum berkembang secara merata dan masih minim sektor alternatif yang mampu menyediakan pekerjaan berkelanjutan. Sejalan dengan temuan ini, Rahmawati et al (2025) menyatakan bahwa desa dengan struktur ekonomi yang tidak terdiversifikasi memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding desa yang memiliki sektor industri rumah tangga dan pariwisata lokal. Zuhaida (2025) juga menegaskan bahwa keberadaan sektor non-pertanian berperan penting dalam memperluas kesempatan kerja di

wilayah perdesaan.

Beberapa responden juga menyoroti hambatan sosial dalam memperoleh pekerjaan, seperti praktik nepotisme atau kecenderungan peluang kerja hanya terbuka bagi kelompok tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan kesempatan kerja tidak sepenuhnya dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat. Individu yang tidak memiliki relasi atau akses tertentu cenderung lebih sulit memperoleh pekerjaan meskipun memiliki kemampuan yang memadai. Fenomena ini sejalan dengan temuan Wulandari et al (2023) yang menyebutkan bahwa jaringan sosial yang sempit menjadi penghambat utama mobilitas kerja di desa. Di sisi lain, responden menilai bahwa peran pemerintah belum sepenuhnya optimal dalam mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Kurangnya kebijakan yang fokus pada penguatan sektor produktif seperti UMKM, industri lokal, maupun pariwisata desa membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Bantuan sosial dinilai belum cukup efektif apabila tidak disertai dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan produktif. Hal ini diperkuat oleh Hanim et al (2022) yang menyatakan bahwa program pemberdayaan ekonomi desa lebih efektif menekan pengangguran dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif.

Selain faktor struktural, responden juga menyebutkan adanya faktor individual, seperti rendahnya motivasi kerja, kecenderungan memilih-milih pekerjaan, serta keterbatasan keterampilan tenaga kerja. Ditambah dengan adanya persyaratan kerja yang semakin tinggi, masyarakat menjadi lebih sulit bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Wahyuni & Maretasari (2022) menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja desa dan kebutuhan pasar kerja menjadi penyebab utama pengangguran struktural. Dengan demikian, hasil kuesioner menunjukkan bahwa penyebab pengangguran di pedesaan bersifat multidimensional dan saling berkaitan, mulai dari keterbatasan lapangan pekerjaan, dominasi pekerjaan musiman, hambatan sosial, lemahnya peran pemerintah, hingga rendahnya kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pengangguran desa harus dilakukan secara terpadu, melalui perluasan kesempatan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar desa mampu menjadi ruang produktif yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan UD Kacang Sangan Joyo Mulyo (sig. 0,005 < 0,05), sehingga hipotesis 1 terbukti kebenarannya.
2. Punishment berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan UD Kacang Sangan Joyo Mulyo (sig. 0,003 < 0,05), sehingga hipotesis 2 terbukti kebenarannya.
3. Lingkungan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja karyawan UD Kacang Sangan Joyo Mulyo (sig. 0,388 > 0,05), sehingga hipotesis 3 tidak terbukti kebenarannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan variabel Reward, perusahaan sebaiknya mempertahankan dan mengoptimalkan sistem bonus berbasis kinerja, memperjelas sistem promosi jabatan, serta meningkatkan pemberian fasilitas nonfinansial seperti program rekreasi dan asuransi kesehatan agar motivasi dan disiplin kerja karyawan semakin meningkat.
2. Berdasarkan variabel Punishment, perusahaan sebaiknya meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam penerapan sanksi secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemotongan gaji, hingga pemutusan hubungan kerja, agar efek jera dapat dirasakan secara merata dan adil.
3. Meskipun Lingkungan Kerja tidak berpengaruh signifikan, perusahaan tetap disarankan untuk mempertahankan kenyamanan fisik tempat kerja dan menjaga kerjasama antar karyawan agar produktivitas dan kepuasan kerja tetap terjaga dengan baik.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti motivasi intrinsik, gaya kepemimpinan, atau budaya organisasi, serta menggunakan sampel yang lebih besar guna meningkatkan generalisabilitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Becker, G. Stanley. (1993). *Human Capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd edition). The University of Chicago Press, Ltd.

- Borjas, G. J., & Cassidy, H. (2021). The Fall and Rise of Immigrant Employment During the Covid-19 Pandemic. *Harvard University*.
- BPS. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Hanim, L., Soponyono, E., & Maryanto, M. (2022). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 30–39. <https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1452> Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2022). *Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)*.
- Mankiw, G. (2021). *Principles of Economics* (Ninth Edition). Cengage Learning.
- Nurhaila, N., & Anwar, K. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Di 10 Kabupaten Kota Di Aceh Dengan Kemiskinan Tertinggi Tahun 2020). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(2).
- Rahmawati, D. A., Pratomo, W., & Radia. (2025). Integrating Problem-Based Learning Model, Culturally Responsive Teaching Approach, and Mind Mapping Media to Enhance the Cognitive Learning Outcomes of Fourth-Grade Students at Klitren Public Elementary School, Yogyakarta. *ICoTPE Proceedings 2025*, 3(1).
- Rohmah, Lutfiati, K., Arisudhana, A., & Sudirman, B. A. P. (2021). Resilensi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Umkm Dan Strategi Bisnis Umkm. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 3(1).
- Sari, N., Fadilla, F., & Aravik, H. (2022). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera Babat Toman. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2).
- Septiningsih, I., Kurniawan, I. D., Santoso, B., Rustamaji, M., & Aldyan, A. (2024). Pengelolaan Aset untuk Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti Kabupaten Klaten. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 2397–2405. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4589>

- Setyowati, F. A., & Melati, I. S. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan. *Economic Education Analysis Journal*, 9(3).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed). Pearson.
- Utami, D. D., & Udjiyanto, W. D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(7), 637–646. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1441>
- Wahab, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Upah, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2).
- Wahyulianti, K., Septiani, E. D., Haryanti, Y., Setianingrum, R., & Farliana, N. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Gender Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 10(1), 75–86. <https://doi.org/10.29407/jae.v10i1.25030>
- Wahyuni, P., & Maretasari, R. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Jasa CV. Citra Abadi Cargo Sidoarjo. *Improvement: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30651/imp.v2i1.12995>
- Wijaya, P. A., Suprihanto, J., & Riyono, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dan Urbanisasi Pemuda di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(1), 117. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v12i1.24503>
- Wulandari, W., Munawaroh, S., & Setiawan, A. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang. *PERSPEKTIF*, 12(1), 345–353. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8661>
- Zuhaida, A. R. (2025). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2014-2023 . UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.